

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah)

Emillia Nurdin¹, Andi Basru Wawo², Sahrul Ramadhan³
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
email : emillia.nurdin@uho.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan ditinjau dari Rasio Keuangan diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016-2020, yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yaitu Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan pada tahun anggaran 2016-2020 berdasarkan : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah sekali tergolong pada pola hubungan instruktif, (2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan dikategorikan sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya sebesar 188,86%, (3) Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan masih memprioritaskan untuk belanja operasi dengan rata-rata sebesar 66,04% dibandingkan dengan belanja modal rata-rata sebesar 33,05%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Aktivitas; Rasio Efektivitas; Rasio Kemandirian

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the financial performance of South Buton district government in terms of regional financial ratios including the ratio of regional financial independence, the ratio of the effectiveness of regional finances, and the ratio of regional financial activities. The data used in this research is the realization report of revenue and expenditure budget of regional government of South Buton District 2016-2020 budget year, obtained from Regional Financial Agency of South Buton district. Data collection using interview, and documentation method. The data analysis techniques used to measure the financial performance of the District government of South Buton is a qualitative descriptive. The results showed the financial performance of South Buton District government in the 2016-2020 budget year based on: (1) the regional financial independence ratio is relatively low on the pattern of instructive relationships, (2) the regional financial effectiveness ratio shows the performance of the South Buton District government, categorized as very effective because of the average effectiveness of 188,86%, (3) the ratio of the financial activity of the South Buton District government shows that most of the funds owned by the district government of South Buton still prioritize to spend operations with an average of 66,04% compared to capital expenditure average of 33,05%.

Keywords: Financial Performance; Activity Ratio; Effectiveness Ratio; Independence Ratio

1. PENDAHULUAN

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Aktivitas (Halim, 2012).

Selanjutnya hasil dari rasio keuangan daerah yang telah dianalisis tersebut digunakan sebagai media pengukuran dalam menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur tingkat efektivitas dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, dan melihat pengendalian biaya dan pengendalian anggaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Kabupaten Buton Selatan yang juga dikenal dengan sebutan Busel merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbentuk saat Kabupaten Buton dimekarkan pada pertengahan 2014, menjelang akhir masa jabatan DPR RI 2009-2014. Akses yang menghambat pelayanan menjadi salah satu alasan pemekaran Kabupaten Buton. Kabupaten telah pindah ke Pasarwajo sejak Kota Baubau dimekarkan pada tahun 2001. Karena tidak ada jalur langsung dari kawasan Buton Selatan ke Pasarwajo, warga Buton Selatan harus melewati Kota Baubau terlebih dahulu sebelum bisa ke sana. Selain itu, Pulau Kadatua, Siompu, dan Batu Atas, pulau paling selatan di Sulawesi Tenggara, memisahkan beberapa bagian Buton Selatan dari Pulau Buton.

Kabupaten Buton Selatan menghadapi sejumlah tantangan keuangan daerah, antara lain: (a) Besaran bantuan pemerintah pusat/provinsi, baik dari sisi anggaran rutin, khusus subsidi untuk daerah otonom, maupun dari sisi anggaran pemerintah daerah, mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. (b) Relatif kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah mencerminkan keterbatasan kemampuan daerah untuk melipatgandakan potensi sumber pendapatan asli daerah. (c) Rendahnya belanja modal dan inefisiensi anggaran operasional pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah berhasil menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak yang diserahi tanggung jawab menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Adanya otonomi daerah ini mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan di Kabupaten Buton Selatan. Mau tidak mau Pemerintah Kabupaten Buton Selatan harus melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah PAD agar tidak terjadi permasalahan di era desentralisasi di masa mendatang. PAD di Kabupaten Buton Selatan berasal dari—pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah—di daerah.

Menganalisis pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu cara untuk mengukur kemampuan dan kinerja keuangan daerah. Pendapatan asli daerah, penerimaan dari dana perimbangan pusat, dan pendapatan daerah lainnya yang sah merupakan komponen pendapatan daerah. Sedangkan belanja operasional, belanja modal, dan pengeluaran tak terduga merupakan pengeluaran daerah. Dari tahun 2016 hingga tahun 2020, tabel berikut memberikan gambaran umum tentang pendapatan dan pengeluaran Kabupaten Buton Selatan.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton
Selatan Tahun Anggaran 2016-2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDAPATAN	517.704.512.689	524.784.609.615	576.632.196.175	617.835.509.437	617.828.222.322
1	Pendapatan Asli Daerah	7.666.531.859	8.494.630.034	25.863.320.999	14.985.034.947	19.877.732.842
2	Pendapatan Transer	492.918.999.730	474.103.390.706	543.298.875.176	564.300.992.490	571.471.059.480
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.118.981.100	42.186.588.875	7.470.000.000	38.549.482.000	26.479.430.000
B	BELANJA	401.350.092.892	453.299.448.407	543.977.113.130	504.196.612.316	518.610.334.688
1	Belanja Operasi	255.596.425.969	269.846.203.394	397.411.853.176	346.718.264.511	337.825.360.258
2	Belanja Modal	145.753.666.923	183.453.245.013	146.547.085.954	157.308.748.819	157.354.216.167
3	Belanja Tak Terduga	-	-	18.174.000	169.598.986	23.430.758.263

Sumber: LRA Kabupaten Buton Selatan tahun 2016-2020

Tabel 1 menunjukkan kondisi sumber Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2020. Dimana Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan masih sangat didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil, dimana kondisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat berdasarkan kontribusi pendapatan asli daerahnya rata-rata sekitar 3% dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan. Hasil tersebut didapat dengan cara membandingkan total PAD dengan total Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dengan demikian maka sumber pendapatan daerah di Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah.

Selanjutnya dilihat dari aspek belanja, dimana belanja operasi di tahun 2016-2020 rata-rata memiliki porsi pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja modal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012). Maka jika melihat aspek Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah, hal ini dikarenakan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Buton Selatan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan diantaranya Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Aktivitas.

2. LANDASAN TEORI

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Halim dan Kusufi (2014) Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2012), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut Mahmudi (2016) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil perolehan dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan berkaitan dalam penggunaan anggaran daerah dengan menilai efisensi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai alat ukur kemampuan daerah. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu di analisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundangan-undangan selama periode anggaran.

Analisis Rasio Keuangan daerah

Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2018).

Menurut Faud (2016), Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan yang lainnya. Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Kegiatan membandingkan tersebut dapat dilakukan antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan, dan perbandingan tersebut dapat berupa angka-angka yang terjadi dalam satu periode atau beberapa periode.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah analisis yang membandingkan pos laporan keuangan satu dengan laporan keuangan lainnya yang berguna untuk mengetahui penilaian posisi atau kondisi perusahaan saat ini. Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antar pos tertentu dengan pos lainnya. Penyederhanaan ini dapat dinilai dengan cepat hubungan antar pos tersebut dapat membandingkan dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan dan penggunaan rasio keuangan itu sendiri harus disesuaikan dengan data APBD. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Aktivitas (Halim, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Buton Selatan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu berupa gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan serta penjelasan baik tertulis maupun lisan sehubungan dengan masalah penelitian.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap aparatur Badan Keuangan Daerah (BKD) yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data Sekunder, data yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2016-2020.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpul data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya atau bertatap muka secara langsung kepada pihak yang berkaitan tentang keuangan daerah yakni dengan Kepala Bidang Akuntansi di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Selatan.
2. Dokumentasi, informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data kuantitatif, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016-2020.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumbangan data eksternal). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian sebaliknya (Halim dan Kusufi, 2014). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25 %	In truktif
Rendah	25-50 %	Konsultatif
Sedang	50-75 %	Partisipatif
Tinggi	75-100 %	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, lalu kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012). Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	Diatas 100%
Efektif	100%
Cukup efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak efektif	Kurang dari 75%

Sumber : Mahmudi, (2018:141)

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi atau belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan di dalam rasio aktivitas ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2018:162). Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2018:163). Belanja Modal dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data eksternal). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian sebaliknya (Halim dan Kusufi, 2014).

Tabel 4
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Asli Daerah	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2016	492.918.999.730	7.666.531.859	1,56%	Instruktif
2017	474.103.390.706	8.494.630.034	1,79%	Instruktif
2018	543.298.875.176	25.863.320.999	4,76%	Instruktif
2019	564.300.992.490	14.985.034.947	2,66%	Instruktif
2020	571.471.059.480	19.877.732.842	3,48%	Instruktif
Rata-rata	529.218.663.516	15.377.450.136	2,85%	Instruktif

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 5 menunjukkan persentase tingkat rasio kemandirian terkecil terdapat tahun 2016 yaitu 1,56%, sedangkan persentase tingkat rasio kemandirian terbesar terdapat pada tahun 2018 yaitu 4,77%. Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Buton Selatan berada pada tingkat rata-rata 2,88% dengan pola hubungan instruktif, sehingga dikatakan berada pada kategori Sangat Rendah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kecil dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat/provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat/provinsi, dan belum cukup mampu untuk mencukupi kebutuhan daerah sendiri.

2) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, lalu kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2012).

Tabel 5
Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas	kriteria Efektivitas
2016	4.507.521.630	7.666.531.859	170,08%	Sangat Efektif
2017	6.557.485.799	8.494.630.034	129,54%	Sangat Efektif
2018	5.749.372.807	25.863.320.999	449,85%	Sangat Efektif
2019	16.480.521.109	14.985.034.947	90,93%	Efektif
2020	19.126.644.556	19.877.732.842	103,93%	Sangat Efektif
Rata-rata	10.484.309.180	15.377.450.136	188,86%	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 6 menunjukkan persentase rasio efektivitas keuangan daerah terkecil terdapat pada tahun 2019 yaitu 90,93%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan lebih kecil dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Sedangkan persentase rasio efektivitas keuangan daerah terbesar yaitu pada tahun 2018 yaitu 449,85%, hal ini disebabkan karena tingginya realisasi penerimaan dari target penerimaan yang ditetapkan. Apabila dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, rata-rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan yaitu 188,86% dengan kriteria Sangat Efektif. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan sangat mampu dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi riil daerah.

3) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja tidak langsung) dan belanja pembangunan (belanja langsung) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi atau belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan di dalam rasio keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2018:162).

2. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2018:163).

Tabel 6
Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan

(Dalam Rupiah)

Tahun	Belanja Operasi (1)	Belanja Modal (2)	Total Belanja (3)	RBO (1:3)	RBM (2:3)
2016	255.596.425.969	145.753.666.923	401.350.092.892	63,68%	36,32%
2017	269.846.203.394	183.453.245.013	453.299.448.407	59,53%	40,47%
2018	397.411.853.176	146.547.085.954	543.977.113.130	73,06%	26,94%
2019	346.718.264.511	157.308.748.819	504.196.612.316	68,77%	31,20%
2020	337.825.360.258	157.354.216.167	518.610.334.688	65,14%	30,34%
Rata-rata	321.479.621.462	158.083.392.575	484.286.720.287	66,04%	33,05%

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 7 menunjukkan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2020, dimana rata-rata rasio belanja operasi berada pada angka 66,04%, sementara rata-rata pada rasio belanja modal berada pada angka 33,05%, angka ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dari rasio belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja operasi. Tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal, dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik.

Pembahasan

1) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan

yang diperlukan daerah. Tingkat kemandirian daerah dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat, apakah Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi sumber keuangan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton. Maka diketahui Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan tergolong masih Sangat Rendah. Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, berawal pada tahun 2016 Rasio Kemandirian sebesar 1,56%, kemudian naik menjadi 1,79% pada tahun 2017. Kenaikan tersebut bersumber dari meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2018 Rasio Kemandirian naik menjadi sebesar 4,76%. Peningkatan yang cukup besar ini terjadi karena tingginya reasalisasi pada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, meningkatnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah seperti laba dari penyertaan modal pada BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada tahun 2019 rasio kemandirian turun menjadi 2,66%. Penurunan ini terjadi karena berkurangnya pendapatan dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 3,48%.

Jika dilihat dari tahun ke tahun pola, kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25%, dimana tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 2,88%. Artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Rendahnya kinerja keuangan dari aspek kemandirian keuangan daerah ini disebabkan oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipicu oleh lambatnya pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta disebabkan oleh perubahan regulasi pendapatan asli daerah.

Penyebab rendahnya tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Buton Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi karena masih rendahnya peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang begitu besar. Hal ini disebabkan karena belum lama terbentuknya Kabupaten Buton Selatan sehingga pemerintah masih perlu melakukan perencanaan dan melakukan upaya-upaya dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan. dalam tahap ini dapat kita lihat bahwa masih lambatnya pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta disebabkan oleh perubahan regulasi pendapatan asli daerah (La Ode Safrin, SE / Kepala Bidang Akuntansi).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun terakhir di Kabupaten Buton Selatan memiliki rata-rata kemandirian yang masih sangat rendah dan pola hubungan yang instruktif. Pola ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah karena daerah dianggap masih belum mampu melakukannya. Dalam kegiatan pemerintahan yang dibiayai sendiri. secara keseluruhan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan dari luar. Kesadaran partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap kecilnya jumlah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pendapatan

Asli Daerah (PAD) yang tidak dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah daerah masih belum dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus dapat memaksimalkan pendapatan dari potensi pendapatan yang ada. Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inisiatif dan kemauan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah baru dan mengembangkan potensi daerah sangat penting. aturan penetapan pajak yang harus dibayar wajib pajak, pemungutan pajak dari wajib pajak secara sistematis dan tertib, pemungutan pajak dan retribusi daerah secara optimal dengan potensi objektif berdasarkan peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan dan pengendalian hanyalah beberapa langkah yang harus dilakukan. diambil untuk mempersiapkan kemungkinan penyimpangan dalam cara aparat mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut penelitian Wa Haisa (2021), Rasio Kemandirian kinerja keuangan daerah Kabupaten Muna dari tahun 2014 hingga 2018 sangat rendah atau instruktif. Rasio median adalah 5,57 persen. Dalam penelitian ini juga terjadi di Kabupaten Buton Selatan, dimana kinerja keuangan dinilai instruktif dan rasio rata-rata adalah 2,85 persen. Wa Haisa mengatakan bahwa alasan kinerja keuangan yang sangat buruk hampir persis sama dengan apa yang dikatakan penelitian ini: kedua daerah ini masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi namun belum mampu mengembangkan potensinya sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

2) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dirancakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Efektivitas keuangan daerah dapat dicapai apabila realisasi penerimaan PAD mencapai maupun melebihi target penerimaan pendapatan asli daerah. Pemerintah dapat meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya sehingga dapat mencapai maupun melebihi target dengan mengoptimalkan faktor-faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2020 menunjukkan keadaan yang fluktuatif atau keadaan yang tidak stabil dan gejala tidak tetap. Berdasarkan perhitungan pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buton Selatan dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sebesar 170,08% dengan kriteria sangat efektif, rasio efektifitas tahun 2017 turun menjadi 129,54% tetapi masih dengan kriteria sangat efektif, tahun 2018 rasio efektifitas keuangan daerah meningkat sangat signifikan menjadi 449,85 % dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 rasio efektifitas keuangan daerah turun menjadi 90,93% dengan kriteria cukup efektif karena berada di bawah 100%, hal ini karena realisasi PAD tidak mencapai target yang ditetapkan, dan pada tahun 2020 rasio efektifitas naik menjadi 103,93%. Peningkatan-peningkatan realisasi yang terjadi ini merupakan dampak dari tingginya realisasi pendapatan asli daerah seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari pada yang ditargetkan.

Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah ini merupakan dampak dari bertambahnya pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pada yang ditargetkan, seperti bertambahnya pajak bumi dan bangunan, bertambahnya retribusi jasa umum, retribusi

pelayanan kesehatan, jasa usaha, adanya pendapatan dari penyertaan modal pada BUMD, dan pendapatan-pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (La Ode Safrin, SE / Kepala Bidang Akuntansi).

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Buton Selatan sudah Sangat Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 188,86%. Mahmudi (2018) mengungkapkan bahwa nilai efektivitas dikategorikan Sangat Efektif jika rasionya melebihi 100%. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dapat dikatakan telah memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan (PAD) yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan (PAD). Pemerintah Daerah juga harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan (PAD), misalnya pendirian (BUMD) sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Verza Ayu Lestari (2020) yang melakukan penelitian di Kabupaten Oku dijelaskan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Oku tahun 2013-2017 jika dilihat dari Rasio Efektivitas (PAD) sudah Efektif, yaitu sebesar 114,39% dengan kriteria Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Oku sudah sangat efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Kabupaten Buton Selatan dilihat dari rasio efektivitasnya diketahui sudah sangat efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan (PAD) yang telah direncanakan.

3) Rasio Aktivitas

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7 diketahui realisasi total belanja daerah Kabupaten Buton Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2019 dimana terjadi penurunan belanja daerah. Pada tahun 2016 belanja daerah Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp 401.350.092.892,00 naik menjadi Rp 453.299.448.407,00 pada tahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 543.977.113.130,00. Dan pada tahun 2019 terjadi penurunan belanja daerah menjadi Rp 504.196.612.316,00, naik kembali pada tahun 2020 menjadi Rp 518.610.334.688,00. Penyebab kenaikan dan penurunan belanja daerah dipicu oleh beberapa hal, pertama perubahan regulasi atau perubahan perundang-undangan itu sendiri terkait dengan kebijakan anggaran, kemudian yang kedua tergantung kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Dan yang ketiga adanya efisiensi belanja.

Penyebab kenaikan dan penurunan belanja daerah dipicu oleh beberapa hal, pertama perubahan regulasi atau perubahan perundang-undangan itu sendiri terkait dengan kebijakan anggaran, kemudian yang kedua tergantung kinerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Dan yang ketiga adanya efisiensi belanja. (La Ode Safrin, SE / Kepala Bidang Akuntansi).

Berdasarkan perhitungan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Rasio Belanja Operasi sebesar 63,68% sedangkan Rasio Belanja Modal sebesar 36,32%. Bisa kita lihat bahwa dari persentase rasio Belanja Operasi lebih mendominasi dibanding rasio Belanja Modal. Hal ini dikarenakan realisasi belanja operasi lebih tinggi dibanding rasio belanja modal.

Tahun 2017 Rasio Belanja Operasi mengalami penurunan menjadi sebesar 59,63%, hal ini dikarenakan realisasi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja

bantuan keuangan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan Rasio Belanja Modal mengalami peningkatan menjadi sebesar 40,47%, hal ini dikarenakan realisasi belanja tanah, bangunan dan gedung, , dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2018 Rasio Belanja Operasi mengalami peningkatan menjadi sebesar 73,06%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan yang keuangan meningkat. Sedangkan Rasio Belanja Modal mengalami penurunan menjadi sebesar 26,94%, penurunan ini dikarenakan realisasi belanja tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung. Meskipun belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2019 Rasio Belanja Operasi mengalami penurunan menjadi sebesar 68,77%, hal ini disebabkan oleh meningkat belanja-belanja dalam komponen belanja operasi dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Rasio Belanja Modal mengalami peningkatan menjadi sebesar 31,20%. Dan pada tahun 2020 Rasio Belanja Operasi mengalami penurunan kembali menjadi 65,14%, hal ini disebabkan oleh belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan mengalami penurunan. Sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan kembali sebesar 30,34%, karena realisasi belanja modal menurun dibanding tahun sebelumnya.

Hasil analisis data keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka kinerja keuangan dari aspek aktivitas keuangan daerah dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rasio aktivitas keuangan daerah yang menunjukkan bahwa rata-rata belanja operasi yaitu 66,04%, dan rata-rata belanja modal yaitu 33,05%.

Berdasarkan perhitungan dan uraian di atas, kinerja keuangan Kabupaten Buton Selatan dari tahun ke tahun kurang stabil jika dilihat melalui rasio aktivitas. Rasio belanja modal relatif rendah karena sebagian besar dana pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional. Hal ini ditunjukkan dengan rasio belanja operasional rata-rata masih melebihi rasio belanja modal rata-rata. Beban pegawai dan barang merupakan mayoritas besar alokasi dana untuk belanja operasional. Namun, alokasi belanja modal oleh pemerintah daerah dapat melebihi proporsi belanja modal secara umum, dan realisasi belanja operasional tidak melebihi proporsi belanja operasional pada umumnya. Alhasil, pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan telah melakukan upaya yang cukup baik dalam mengelola dananya.

Pada umumnya porsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya masih rendah, dan daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2018).

Namun dengan ini juga dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum terlalu memperhatikan pembangunan daerah. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Buton Selatan diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Elien Noviyanti (2021) dijelaskan bahwa Rasio Kerasian (aktivitas) Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan sebagian besar

anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 77,88% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 22,92%. Hal tersebut hampir sama apa yang terjadi pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari Rasio Aktivitas keuangan daerah yang menunjukkan bahwa rata-rata belanja operasi yaitu 66,04%, dan rata-rata belanja modal yaitu 33,05%.

5. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 berada pada kategori Sangat Rendah atau berada pada pola hubungan Instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25%, dimana rata-rata rasio kemandiriannya sebesar 2,88%. Artinya peranan pemerintah pusat dan provinsi lebih dominan dari pada kemandirian keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah tergolong Sangat Efektif, karena realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, dimana rata-rata rasionya di atas 100%, yaitu 188,86%. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan jika dari rasio aktivitas keuangan daerah pada tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten buton selatan mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 66,04% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 33,05%.

Implikasi

1. Bagi instansi penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Juga dapat meningkatkan kemandirian, dan efektivitas sektor publik dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Kabupaten Buton Selatan.
2. Bagi penulis dan pembaca dapat memeperdalam pengetahuan dibidang keuangan, terutama yang berkaitan dengan analisis keuangan dan digunakan sebagai penerapan ilmu dari materi-materi yang meliputi perhitungan rasio keuangan yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan.l
3. Bagi pembaca, memberikan informasi kepada publik sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh pemerintahan daerah pada era otonomi daerah.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas hanya pada pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan rasio keuangan ditinjau dari aspek Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Aktivitas

Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan agar meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerapan pajak daerah, pembangunan Badan Usaha Milik Daerah BUMD) dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat dengan cara mengelola sumber daya yang sudah diolah maupun yang belum diolah selama ini. Selain itu, diharapkan agar pemerintah daerah

Kabupaten Buton Selatan dapat mengurangi anggaran daerah untuk belanja operasi, dan dapat meningkatkan anggaran daerah untuk belanja modal, sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya dalam melakukan penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah lagi jangka waktu penelitian tidak hanya 5 tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Faud, Moh. Ramli. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: Gh alia Indonesia.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik Edisi Ke 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan. Yogyakarta : CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of the Quality of Financial Reports. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), e01331. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1331>
- Anto, L., Husin, H., Hamid, W., & Bulan, N. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49-58.
- Mahmudi. (2018). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wa Haisa, 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan JAK*. Vol. 6, No. 1 : 319-336.